

## **INTERAKSIONISME SIMBOLIK ANTARA STAF HUMAS PEMERINTAH DENGAN “WARTAWAN TANPA MEDIA MASSA”**

**Oleh:**

Apriliyanti

Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat Politeknik LP3I Bandung

### **ABSTRAK**

Wartawan atau insan pers yang jujur dan bersih, jumlahnya kini sangat banyak di berbagai kawasan di tanah air. Wartawan memiliki tanggung jawab moral terhadap media tempat mereka bernaung dan lebih luas lagi terhadap khalayak atau publik. Humas sebagai mitranya harus selalu siap menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan wartawan akan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yang pasti sangat beraneka.

Dalam penelitian ini, istilah yang akan digunakan untuk menyebut “wartawan” semacam ini adalah “Wartawan Tanpa Media Massa (WTMM)”. Adanya pemberian “amplop” dan uang THR bagi “WTMM” yang meliput di kantor Pemprov Jabar merupakan tanda tanya besar yang perlu segera ditindak lanjuti. Di satu sisi, organisasi kewartawanan seperti PWI berjuang keras untuk mampu memberantas keberadaan “WTMM”.

Kata kunci: *Wartawan, Humas, Interaksionisme, Wartawan Tanpa Media Massa*

### **Pendahuluan**

Wartawan memiliki tanggung jawab moral terhadap media tempat mereka bernaung dan lebih luas lagi terhadap khalayak atau publik. Dalam menjalankan profesinya, wartawan harus berhati-hati karena apa yang mereka tulis dan mereka sampaikan pada publik, bisa saja ditelan mentah-mentah oleh publik. Wartawan bekerja berdasarkan mandat masyarakat. Ada dua hal pokok isi mandat masyarakat yang diembankan kepada lembaga pers yang diaktualisasikan wartawan, yakni hak tahu dan hak memberitahukan. Wartawan wajib mewujudkan isi kedua hak masyarakat tersebut.

Untuk mewujudkan hak tahu masyarakat, wartawan harus tekun dan gigih mencari fakta-fakta (informasi) penting yang dibutuhkan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Agar ini dapat diwujudkan wartawan, Humas sebagai mitranya harus selalu siap menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan wartawan akan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, yang pasti sangat beraneka.

Ini berarti Humas dan wartawan sesungguhnya sama, yakni sama-sama abdi (pelayan) masyarakat. Bedanya, Humas pemerintahan yang umumnya berstatus PNS, pastilah digaji negara melalui lembaga pemerintahan, sedangkan wartawan yang umumnya berstatus pegawai swasta, pastilah digaji perusahaan di mana mereka bekerja. Meskipun status dan jenis instansinya berbeda, namun kedua mitra ini harus benar-benar mampu bekerja sama

dengan baik dalam posisi dan sikap saling menghormati dan menghargai mitra masing-masing.

Untuk itu penting sekali dalam sebuah kegiatan kehumasan menjalin hubungan pers atau *Media Relations* yang baik dengan para pemimpin dan wartawan surat kabar, majalah, radio dan televisi. Perlakuan yang berdasarkan *like* dan *dislike* dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita/tulisan-tulisan yang tidak akurat, bahkan berita yang tidak benar tentang lembaga atau perusahaan itu, yang mungkin dapat membawa kerugian (Abdurachman, 2001:41). Walaupun begitu, hubungan pribadi antara Humas dan pers tidak berarti harus “melacurkan” profesi masing-masing dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Baik pers atau pun Humas harus tetap proporsional dalam pemuatan dan penyiaran berita.

Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak “wartawan” yang melakukan penyelewengan. Dari sisi pers, banyak wartawan yang menghalalkan segala cara demi mendapat uang tambahan dari sumber berita. Wartawan semacam ini lebih dikenal dengan istilah wartawan “amplop”, yaitu wartawan yang bersedia menerima uang dari sumber berita dengan tujuan tertentu. Memang ada segelintir media yang melarang para wartawannya menerima sesuatu dari siapapun, khususnya narasumber. Di samping itu terdapat pula orang-orang yang berkalung kartu pers, melakukan liputan layaknya wartawan, memiliki media dan produk jurnalistik, tetapi kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan ditujukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Dalam penelitian ini, istilah yang akan digunakan untuk menyebut “wartawan” semacam ini adalah “Wartawan Tanpa Media Massa (WTMM)”. Disebut tanpa media massa karena media yang mereka punya atau nama organisasi yang memayungi mereka adalah organisasi non-media massa, hanya ciri-ciri fisiknya yang mirip media massa. Disebut “wartawan”, untuk memudahkan pembatasan masalah lantaran embel-embel wartawan telah terlanjur melekat pada orang-orang seperti di atas yang tetap melakukan kegiatan seperti wartawan profesional.

Kehadiran “Wartawan Tanpa Media Massa” atau “WTMM” pada kenyataannya memang sangat meresahkan. Salah satunya yang terjadi di instansi pemerintahan, anggaran untuk media dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sering teralokasikan untuk “WTMM”. Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, tak sedikit “wartawan tanpa media massa” turut serta ikut meliput ketika ada suatu kegiatan atau pun peristiwa yang

terjadi di tempat tersebut. Mereka berperilaku bak wartawan betulan, melakukan wawancara terhadap sumber berita serta mencatat setiap apa yang dikatakan narasumber.

**BEKASI, TEMPO-** Wartawan bodrek atau wartawan tanpa media yang jelas akan mendapat alokasi anggaran bonus istimewa berupa “uang ketupat”. Meskipun soal ini masih menjadi kontroversi di kalangan pejabat sendiri, tunjangan hari raya (THR) itu dipastikan tetap diluncurkan. Hal ini dianggap Pemerintah Kota Bekasi sebagai “terobosan” baru untuk menghindari keributan dan serbuan para wartawan bodrek. Hal itu dikatakan sumber *Tempo* di lingkungan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Senin (01/09) di ruang kerjanya. Jumlah wartawan bodrek yang bakal mendapat bonus itu umumnya adalah yang sering berkeliaran di kantor-kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pemberian itu, direncanakan akan dilakukan beberapa hari sebelum lebaran tiba. (Harian Umum *Tempo*, Senin, 01/09/2011)<sup>3</sup>

Namun tidak bisa di pungkiri fenomena pembagian “amplop” seperti sudah menjadi sebuah tradisi, seperti yang terjadi di lingkungan Pemprov Jabar. Mereka kerap hadir dalam setiap acara yang diadakan oleh Pemprov Jabar dan biasanya hadir lebih awal dibandingkan dengan wartawan profesional. Tetapi, wartawan yang tergolong “wartawan tanpa media massa” tidak pernah bergabung dengan wartawan Pemprov Jabar, mereka lebih senang bergabung dengan orang-orang memiliki satu visi misi dengan mereka yaitu berpura-pura berprofesi sebagai wartawan.

“WTMM” seringkali menimbulkan keresahan karena tindakan “pemerasan” yang mereka lakukan. Tindakan ini memberi noda hitam pada profesi kewartawanan. Pelanggaran terhadap suatu profesi dapat dijerat oleh pasal 228 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.”

Ledakan media merupakan fenomena yang terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dibuka seluas-luasnya, dan siapa saja berhak mendirikan penerbitan pers. “WTMM” merupakan modifikasi dari wartawan gadungan. Wartawan gadungan di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1960 dan terus ada hingga saat ini. Dahulu jumlahnya tidak banyak, namun membludak karena *booming* (ledakan) media.

---

<sup>3</sup> Harian Umum *Tempo*, Senin, 01/09/2011

### **Pengertian Interaksionisme Simbolik**

Menurut teori interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Lebih lanjut, Mulyana (2001:118) menjelaskan bahwa mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Kelebihan manusia dalam berpikir memunculkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pernyataan-pernyataan manusia, sehingga menimbulkan interaksi khusus antar manusia.

Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut :

1. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, alih-alih respon mereka tergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegoisasikan melalui penggunaan bahasa. Negoisasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditentukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri, manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan dilakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespon ucapan atau tindakan mereka.

Ketiga premis ini mengandung arti bahwa interaksi sosial, penafsiran merupakan hal esensial yang mempengaruhi definisi sosial. Konsep diri merupakan definisi yang diciptakan melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, untuk mempengaruhi tingkah laku manusia baik itu sebagai komunikator maupun komunikan, kita harus memahami sistem makna yang diasuh oleh manusia yang dipelajari.

Teori Interaksionisme simbolik dalam jurnal ini akan menjadi dasar pengembangan analisis bagi penulis untuk menelaah interaksi yang terjadi antara staf Humas pemerintah

dengan “WTMM”. Jenis interaksi dan simbol-simbol apa saja yang digunakan ketika mereka berinteraksi akan ditelaah menggunakan teori interaksi simbolik.

### **Pengertian Hubungan Masyarakat**

Humas pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi, kendati agak lain dengan kegiatan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki dari komunikasi Humas adalah *two way communications* (komunikasi dua arah). Arus komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam kegiatan Humas/Public Relations (PR), sehingga terciptanya umpan balik yang merupakan prinsip pokok dalam PR (Rachmadi, 1994:7).

Rachmadi menyebutkan PR adalah salah satu bidang ilmu komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi/perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen. PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga/perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *goodwill* (kemauan baik) publiknya serta memperoleh opini publik yang menguntungkan (alat untuk mencipta kerjasama berdasarkan hubungan baik dengan publik).

Batasan dari Griswold menyebutkan bahwa PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan membuat perencanaan, dan melaksanakan suatu program kerja dalam upaya memperoleh pengertian dan pengakuan publik.

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. PR membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. PR secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan (Seitel, 1992:8)

Definisi lainnya, Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relations in Word Marketing* mengatakan bahwa PR adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik. L. Bernays dalam bukunya *Public Relations* menyebutkan bahwa PR mempunyai arti: (1) penerangan kepada publik; (2) persuasi ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik; (3) upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga. Prof. Byron Christian menyebutkan bahwa PR merupakan suatu usaha yang secara sadar

memotivasi agar orang-orang terpengaruh, terutama melalui komunikasi, agar timbul pikiran yang sehat terhadap suatu organisasi, memberi rasa hormat, mendukung dan bertahan dengan berbagai cobaan dan masalah.

### **Pengertian Humas Pemerintah**

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dan non pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan (aspek komersial), walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam aspek publikasi, promosi, dan periklanan. Tetapi lebih menekankan pada *public services* atau demi meningkatkan pelayanan umumnya.

Menurut John D. Millet dalam bukunya, *Management in Public Service the Quest for Effective Performance*, yang artinya Humas/PR dalam dinas instansi/ lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (*learning about public desires and aspiration*).
2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (*advising the public about what is should desire*).
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan public dengan para aparat pemerintah (*ansuring satisfactory contact between public and government official*).
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh sutau lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (*informing and about what an agency is doing*).

Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu antara lain:

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan apa dan bagaimana yang kan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, social, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparat pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

### **Pengertian Wartawan Tanpa Media Massa**

Jurnalistik merupakan lahan yang “menggiurkan” dan menjanjikan pendapatan yang cukup lumayan karena setiap tulisan yang dimuat di surat kabar atau majalah pastinya mendapat honorarium (Ngaifun, 1995:10). Menjadi jurnalis adalah salah satu cara yang digunakan orang-orang untuk menambah uang saku dari hasil tulisan yang di muat di media massa.

“Wartawan Tanpa Media Massa” (WTMM) adalah istilah yang penulis gunakan untuk menyebut orang-orang yang melakukan liputan layaknya wartawan namun tidak memiliki media massa. Pekerjaan meniru profesi wartawan ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari merebaknya budaya amplop. Yang penulis maksud sebagai “WTMM” dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mendapat gelar sebagai “wartawan bodrex”, “wartawan muntaber”, dan “Wartawan Tanpa Surat kabar (WTS)”.

Orang-orang ini sebetulnya tidak pantas disebut wartawan karena mereka tidak menjalankan tugas-tugas wartawan, hanya saja mereka hadir di tempat liputan wartawan dan berperilaku seolah-olah sebagai wartawan. Zaenuddin dalam buku *The Journalist* menyebutkan bahwa “wartawan bodrex”, “wartawan muntaber”, atau WTS sebetulnya tidak pantas disebut wartawan, sebab mereka tidak menjalankan tugas wartawan. Embel-embel wartawan sudah terlanjur digunakan, karena mereka sering mengaku sebagai wartawan.

Batasan “WTMM” dalam tulisan ini adalah mereka yang berperilaku atau mengidentikkan diri mereka seperti wartawan tetapi tidak bernaung di bawah institusi media massa manapun. Istilah wartawan masih digunakan untuk mempermudah pembatasan masalah lantaran embel-embel ini sudah terlanjur digunakan dan melekat hingga saat ini. Untuk itu penulis menggunakan tanda kutip pada kata wartawan yang menyatakan bahwa gelar wartawan yang mereka sandang masih harus dipertanyakan.

“WTMM” memiliki produk jurnalistik seperti jurnal, koran, tabloid, atau surat kabar mingguan. Tetapi produk jurnalistik itu tidak dapat digolongkan sebagai media massa. Produk jurnalistik yang mereka miliki dibuat sesuai tulisan yang akan mereka perlihatkan pada narasumber. Produk jurnalistik mereka memiliki oplah yang sangat kecil, antara 30 eksemplar untuk satu daerah pemasaran seperti Kota Bandung, Kota Medan, Jakarta, dan lain sebagainya. “WTMM” menjadikan jurnalistik sebagai sarana mencari uang. Jika wartawan profesional menerima imbalan dari perusahaan pers untuk setiap tulisan yang naik cetak, namun “WTMM” mendapatkan imbalan dari narasumber.

### **Latar Belakang Munculnya “Wartawan Tanpa Media Massa”**

Awal kemunculan “WTMM” di Kota Bandung khususnya di lingkungan kantor Pemprov Jabar tidak terlepas dari proses awal kemunculan cikal bakal munculnya “WTMM” di Indonesia. Kemunculan cikal bakal “WTMM” dimulai tahun 1960-an yang dikenal dengan istilah WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar) yang terjadi setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Peristiwa lain yang menjadi latar belakang munculnya “WTMM” khususnya di lingkungan kantor Pemprov Jabar adalah bermula dari era reformasi tahun 1988 yang diikuti oleh keluarnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, yang istimewa dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa kemerdekaan pers di buka seluas-luasnya.

Selain itu, latar belakang munculnya “WTMM” di lingkungan kantor Pemprov Jabar ini pun disebabkan oleh timbul tenggelamnya media massa, tidak adanya kepastian mengenai politik hukum dan kemerdekaan pers, sulitnya mencari lahan pekerjaan ditengah desakan kebutuhan ekonomi selepas reformasi, dan karena adanya tradisi pemberian uang transportasi di Pemprov Jabar.

### **Tradisi Pemberian “Amplop”**

Korupsi merupakan suatu kebiasaan yang tidak bisa ditampik menjadi penyebab tumbuh suburnya “WTMM” di Indonesia. Dari cikal bakal hingga perkembangan “WTMM” saat ini, tradisi korupsi adalah nyawa yang memberi ruang bagi “WTMM” dapat hidup dan berkembang. Jika tidak ada korupsi, tidak akan ada orang yang bertahan menjadi “wartawan tanpa media massa” karena mereka tidak mendapat gaji dari kantor.

Pada tahun 1960-an beberapa wartawan yang telah dipecat masih melakukan liputan dengan berpura-pura menjadi wartawan karena mereka melihat ada peluang hidup dari “amplop” yang diberikan sumber berita setiap kali melakukan liputan. Apalagi dalam instansi pemerintahan, pejabat selalu memberikan “amplop” sebagai pengganti uang transportasi untuk wartawan.

Salah satunya yang terjadi di Pemprov Jabar. Setiap ada kegiatan peliputan, para wartawan yang meliput dimanjakan dengan adanya uang transportasi atau biasa Humas Pemprov sebut dengan uang *kadeudeuh*. Pemberian “amplop” tersebut saat ini dapat dikatakan sebuah tradisi yang selalu dilakukan oleh staf Humas Pemprov Jabar.

## Hubungan Humas Dengan Wartawan

Istilah dan profesi Public Relations (PR) semakin hari, makin memasyarakat dan mendapat tempat dalam kegiatan bisnis modern, sehingga banyak perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa merasakan beratap pentingnya membentuk divisi/ bidang PR di perusahaan mereka untuk memperoleh citra positif dan merebut dukungan publik dalam upaya mengembangkan usaha mereka.

Salah satu kegiatan PR dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik adalah kegiatan Hubungan Pers (Press Relations/Media Relations) yakni membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media ceetak (suratkabar/majalah) dan media elektronik (tv/radio).

Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya *Public Relations*, menyebutkan bahwa *Definition of press relations. The role of press relations is to achieve maximum publication or broadcasting of PR informations in order to create knoeledge and understanding* (1995:92)

Batasan Jefkins (1995:95) mengenai peranan hubungan pers adalah untuk memperoleh pemuatan atau penyiaran secara maksimal tentang informasi PR yang disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya. Seringkali orang masih salah mengasumsikan bahwa PR sama dengan press relations karena kadang kala singkatan keduanya adalah PR. Padahal press relations hanyalah salah satu bagian dari PR. Hubungan pers tidak hanya terbatas kepada pers, tetapi termasuk semua media yang memuat berita seperti pers (suratkabar/majalah), radio, televisi, dan *cinema newsreel* (bioskop yang sarat dengan berita).

Penting sekali dalam sebuah kegiatan PR menjalin hubungan pers atau *Media Relations* yang baik dengan para pemimpin dan reporter/wartawan surat kabar, majalah, radio dan televisi. Perlakukan berdasarkan *like* dan *dislike* dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita berita/tulisan-tulisan yang tidak akurat, bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi/perusahaan itu, yang mungkin dapat membawa kerugian (Abdurachman, 2001:41).

Hubungan pribadi antar PRO dan pers tidak berarti harus “melacurkan” profesi masing-masing dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Misalnya berita-berita yang sebenarnya tidak layak muat atau terjadi distorsi dalam pemuatannya akan membohongi pembaca. Baik pers ataupun PRO harus tetap proporsional dalam pemuatan dan penyiaran berita. Dalam pengertian pers menyiarkan berita untuk kepentingan sebagian besar pembacanya, bukan malah menjadi juru bicara atau kepanjangan tangan PRO. Begitu pula

PRO tidak memaksakan kehendak atau mendapat perlakuan istimewa agar setiap informasi PR harus selalu dimuat atau disiarkan, kendati sebenarnya tidak layak berita.

Dalam upaya membina hubungan pers yang baik, PRO harus mengerti seluk beluk media massa itu sendiri. Misalnya bagaimana surat kabar dan majalah itu diterbitkan dan bagaimana pula program-program televisi dan radio diproduksi. Fungsi PR adalah membina hubungan baik dengan eksternal publik, dalam hal ini pers, karena PR tidak hanya mengandalkan media internal atau semi eksternal (*House Journal*) yang dimilikinya, tetapi juga memerlukan media massa untuk mempublikasikan berbagai kegiatan perusahaan/organisasi. Pemeliharaan hubungan baik dengan pers tidak akan membuat kesulitan bagi PR dalam menyebarkan informasi melalui media massa.

Dalam operasionalnya baik PR maupun pers senantiasa berhasrat untuk menjaga dan mengembangkan citra (*image*) yang baik. Kedua institusi menyadari benar bahwa citra yang baik terkait dengan kredibilitas masing-masing sebagai sumber informasi. (Depari dalam Ardianto, 2004:125). Hakikat pekerjaan PR dan pers, ungkap Depari, dalam kaitannya dengan pengelola informasi sebenarnya tidak jauh berbeda. Kedua lembaga harus mengusahakan agar informasi yang bersumber pada kegiatan masing-masing diolah menurut prinsip-prinsip jurnalistik tentang nilai berita (*news value*) sehingga menarik untuk disajikan sebagai berita. Baik PR maupun pers menyadari persamaan tersebut dalam posisi, fungsi serta peran masing-masing dalam penyaluran informasi, sehingga hubungan kemitraan antara keduanya akan fungsional. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang kita jumpai distorsi dalam hubungan kerja antara PR dan pers.

### **Studi kasus Interaksi Simbolik Humas pemerintah dengan WTMM**

“Amplon” bagi “WTMM” telah menjadi tradisi dalam arti bahwa sumber berita atau staf Humas sudah pasti menyediakan “amplon” dengan istilah uang transportasi bagi “WTMM.” Dikatakan tradisi, karena praktik pemberian “amplon” dalam bentuk uang transportasi ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi sebuah kegiatan yang rutin.

Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri uang semacam ini disebut sebagai uang kontribusi, dana koordinasi atau uang transportasi. Hady, staf Humas Pemprov Jabar sub bagian publikasi, mengatakan bahwa uang transportasi memang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Uang transportasi ini diberikan kepada wartawan pada acara *press conference* atau kegiatan-kegiatan Pemprov yang di adakan di luar lingkungan kantor Pemprov Jabar.

Lebih lanjut Hady mengatakan, besarnya uang transportasi ini bermacam-macam, besarnya antara Rp. 50.000-Rp. 100.000. Namun tidak semua wartawan mau menerima uang transportasi ini. Wartawan dari media yang jelas terbitnya seperti *Kompas*, *Pikiran Rakyat*, *Galamedia*, *Inilah Koran* dan lain sebagainya biasanya menolak menerima uang transportasi ini. Berbeda halnya dengan “WTMM” yang justru sepertinya sangat mengharapkan, uang transportasi ini selama liputan.

Andry rekan hady menambahkan, kehadiran mereka terkadang mengganggu karena yang diinginkan mereka tidak lain hanyalah uang. Tapi tergantung dari staf Humas itu sendiri apakah mau mengikuti permintaan mereka, apakah membiarkan mereka pergi tanpa membawa hasil apa-apa. Sebagai staf Humas yang cerdas, tentunya harus mampu mengendalikan mereka tanpa memenuhi permintaan mereka. Berinteraksi sewajarnya, tidak perlu mencemooh atau menjauh cukup menyapa sewajarnya saja.

Selain uang transportasi, berbagai fasilitas yang menggiurkan kini tak henti-hentinya diberikan setiap instansi pemerintahan kepada wartawan tak terkecuali kepada “WTMM.” Fasilitas tersebut salah satunya adalah fasilitas pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian THR ini pun sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi termasuk yang terjadi di Pemprov Jabar.

Memang terdengar janggal di telinga, karena seharusnya THR diberikan oleh perusahaan media di tempat wartawan bekerja. Namun pada kenyataannya banyak wartawan yang mengharapkan THR dari staf Humas instansi perusahaan atau dari sumber berita. Fenomena di atas membuat Pemprov Jabar dengan sengaja mencantumkan anggaran untuk wartawan termasuk untuk “WTMM”.

Andry menambahkan, pembagian uang THR memang menjadi sebuah tradisi yang tak bisa dirubah dikalangan “WTMM.” Berbeda dengan fenomena yang terjadi di kalangan wartawan profesional. Mereka justru enggan menerima uang THR dari instansi pemerintahan seperti Pemprov Jabar. Bagi wartawan profesional itu sama saja dengan suap.

Deddy, staf Humas Pemprov Jabar sub bagian publikasi membenarkan pernyataan Andry. Setiap menjelang hari raya Idul fitri, jumlah “WTMM” semakin banyak. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi adanya pembagian uang THR. Namun, wartawan profesional biasanya menolak pemberian tersebut, karena ada beberapa media massa yang memiliki kebijakan untuk tidak menerima apapun dari suatu instansi pemerintahan maupun dari perusahaan.

Selain dari kegiatan pemberian uang transportasi dan THR, interaksi yang sering terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM” adalah pada saat pembagian *press*

*release*. “WTMM” memang tidak pernah menulis berita, karena mereka tidak punya media massa. Namun, pola kerja mereka yang selalu meniru wartawan profesional membuat mereka berpura-pura membutuhkan *press release* sebagai bahan untuk menulis.

Deddy selaku staf Humas Pemprov Jabar menambahkan, “WTMM” sering pula meminta bahan berita diluar *press release* atau terkadang mereka juga memaksa untuk mewawancarai sumber berita karena dirasa data yang diperoleh kurang lengkap. Sebagai staf Humas yang memiliki kewajiban sebagai abdi masyarakat yang bertugas melayani masyarakat sebaik-baiknya, mau tidak mau harus menuruti keinginan mereka walaupun bukan rahasia umum lagi mereka jarang menulis berita.

Faktor eksternal merupakan salah satu penyebab munculnya “WTMM”, diantaranya yakni adanya mental serba suap yang berlaku pada sistem sosial masyarakat kita. Banyak warga di sistem sosial kita yang berpandangan segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Karena itu jika sewaktu-waktu menghadapi masalah, daripada berurusan dengan aparat, banyak warga yang memilih mengeluarkan dana tertentu alias menyogok alias menyuap. Banyak warga yang lebih memilih mengeluarkan uang atau menyuap petugas, daripada harus berurusan dengan meja hijau atau aparat penegak hukum.

Hady menambahkan, perlu adanya sikap yang tegas ketika akan menghadapi “WTMM”. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari ancaman ataupun pemerasan sebagaimana kegiatan yang biasa mereka lakukan ketika datang ke instansi-instansi pemerintahan seperti Pemprov Jabar. Hady hanya mau melayani “WTMM”, sebatas pemberian *press release* saja, lebih dari itu Hady memilih untuk menghindar karena berurusan dengan mereka sama saja dengan menambah masalah.

### **Analisis Teoritis**

Adanya keinginan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, membuat Humas pemerintahan terkadang melakukan berbagai cara. Seperti pemberian “amplop” dalam bentuk uang transportasi, hadiah, dan lain-lain kepada “wartawan tanpa media massa”. Mereka biasanya memang mencari uang dengan memeras sumber berita termasuk memeras dan meminta kepada staf Humas pemerintahan. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari penghasilan wartawan yang rata-rata dibawah upah minimum regional.

Penelitian yang dilakukan oleh Anthon Simbolon (2011) menjadi salah satu bukti, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan salah satunya karena penghasilan mereka yang dirasa kurang mencukupi. Akhirnya mereka melakukan berbagai cara untuk

mendapatkan uang. Apalagi “Wartawan tanpa media massa” yang memang bukanlah wartawan yang terdaftar secara resmi dalam sebuah perusahaan media massa, mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Mereka tidak memiliki media yang mampu memberikan gaji yang besar dan tetap setiap bulannya, sehingga timbulah tindakan pemerasan dan pengancaman.

Fenomena munculnya wartawan semacam ini telah mencoreng dan melunturkan kredibilitas profesi wartawan di mata masyarakat ataupun sumber berita. Wartawan sebagai pers yang menjalankan fungsi pemantauan lingkungan (*public watchdog*) jadi tidak lagi dipercayai oleh masyarakat, karena masyarakat tidak lagi dapat diasumsikan sebagai kesatuan yang lemah dan tidak berdaya terhadap terpaan media massa. Masyarakat saat ini adalah kesatuan yang memiliki daya skeptisme dan kesadaran (*awareness*) sehingga dapat memberikan penilaian terhadap profesi wartawan.

Sistem sosial dimasyarakat kita yang demikian inilah, yang membuat tiga pilar penegakan hukum jadi lembaga yang paling banyak mendapat godaan. Tiga pilar tersebut masing-masing yakni jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sejumlah warga lebih memilih mengeluarkan uang, jika harus berurusan dengan tiga lembaga tersebut. (Zen, 2010:102)

Menurut teori interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Lebih lanjut, Mulyana (2001:118) menjelaskan bahwa mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Contoh konkrit dari interaksi secara simbolik yaitu yang terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM”. Mereka berinteraksi menggunakan simbol-simbol berupa “amplop” yang diberikan pada moment-moment tertentu dengan maksud tertentu pula.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Agung Prastowo (2009). Penelitian Ari mengkaji mengenai fungsi Humas pemerintahan di era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Hasil penelitian yang dilakukan Ari menyebutkan bahwa ada beberapa lembaga pemerintahan, terkendala dalam menerapkan fungsi Public Relations. Salah satu penyebabnya adalah posisi Humas pemerintah yang masih di bawah bagian lain belum menjadi koalisi dominan artinya adalah Humas Pemerintah belum mendapatkan kepercayaan untuk berperan serta dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Penelitian Ari

lebih menitikberatkan kepada fungsi dan tugas Humas pemerintahan yang sebenarnya tanpa melibatkan wartawan. Namun dalam pelitiannya ini Ari berusaha mengungkap fungsi dan tugas Humas yang sebenarnya termasuk fungsi dan tugas Humas dalam membina media relations.

### **Kesimpulan**

Wartawan atau insan pers yang jujur dan bersih, jumlahnya kini sangat banyak di berbagai kawasan di tanah air. Mereka sehari-hari begitu tekun menjalankan profesi, dengan memegang teguh amanah yang diembannya. Mereka inilah wartawan profesional, yang menjalankan profesi dengan baik dan pantang menodai profesi yang diembannya.

Namun, diantara sekian banyak wartawan yang ada di tanah air, ternyata jumlah wartawan nakal dan masih melakukan penyelewengan masih relatif banyak. Merebaknya jumlah wartawan nakal ini, bukan semata-mata berasal dari faktor internal wartawan saja. Faktor eksternal atau faktor kehidupan sosial makro, juga turut andil terhadap munculnya wartawan nakal alias “WTMM”.

Faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya “WTMM”, diantaranya yakni adanya mental serba suap yang berlaku pada sistem sosial masyarakat kita. Banyak warga di sistem sosial kita, yang berpandangan segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Karena itu jika sewaktu-waktu menghadapi masalah, daripada berurusan dengan aparat, banyak warga yang memilih mengeluarkan dana tertentu alias menyogok alias menyuap. Banyak warga yang lebih memilih mengeluarkan uang atau menyuap petugas, daripada harus berurusan dengan meja hijau atau aparat penegak hukum.

Sistem sosial di masyarakat kita yang demikian inilah, yang membuat tiga pilar penegakan hukum jadi lembaga yang paling banyak mendapat godaan. Tiga pilar tersebut masing-masing yakni jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sejumlah warga lebih memilih mengeluarkan uang, jika harus berurusan dengan tiga lembaga tersebut. (Zen, 2010:102)

Budaya suap, ternyata juga menjalar di kalangan politisi atau partai politik. Begitu mendaftar sebagai calon legislatif atau Caleg untuk Pemilu, seorang kader partai seringkali harus mengeluarkan dana berlimpah, dari kantong pribadinya. Dana yang dikeluarkan oleh seorang Caleg, biasanya dibagi dalam dua kategori, yakni dana resmi dan tidak resmi. Dana resmi yakni dana yang diperuntukkan bagi kas partai atau untuk kepentingan

operasional partai. Jumlah dana resmi ini biasanya diumumkan secara terbuka kepada kader partai yang lain.

Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada dunia pers. Aktivitas suap-menyuap dalam bentuk “amplop” yang sering diistilahkan sebagai uang transportasi, uang THR dan lain-lain sering terjadi. Kesemua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu suap. Hal tersebut terbukti dari interaksi yang terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM”.

Menurut teori interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Lebih lanjut, Mulyana menjelaskan bahwa mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Contoh konkrit dari interaksi secara simbolik yaitu yang terjadi antara staf Humas Pemprov Jabar dengan “WTMM”. Mereka berinteraksi menggunakan simbol-simbol berupa “amplop” yang diberikan pada moment-moment tertentu dengan maksud tertentu pula.

Tugas dan kewajiban wartawan pada prinsipnya adalah mencari dan menggali informasi secara benar, lantas menyajikan informasi tersebut ke publik lewat pemberitaan yang seimbang. Karena itu seorang wartawan dituntut untuk mampu menggali informasi secara detail dan mendalam, agar bisa memberitakan sesuatu secara lengkap. Wartawan juga dituntut mampu menggali informasi dari sumber yang beragam, untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas berita tersebut.

Karena tugas wartawan adalah mencari dan menggali informasi, maka apabila ada seorang wartawan yang datang, pihak sumber berita atau staf Humas hendaknya memberikan informasi secara benar. Apapun informasi yang perlu digali seorang wartawan, pihak sumber berita atau staf Humas sebaiknya bersikap akomodatif. Namun apabila wartawan tersebut ulahnya sudah mengarah ke permintaan “amplop”, sumber berita atau staf Humas hendaknya dengan tegas berani menolaknya.

Urusan sumber berita atau staf Humas hanyalah menjawab atau memberikan informasi sepanjang yang dibutuhkan wartawan, sedangkan imbalan dana bagi wartawan berasal dari kantor tempat wartawan tersebut bekerja. Untuk mencegah merebaknya “WTMM”, sebaiknya baik sumber berita maupun staf Humas suatu instansi pemerintahan berani memproklamkan slogan “berita Oke, tapi “amplop” No”. Wartawan dipersilahkan menggali berita secara leluasa, tapi jangan sekali-kali dilayani jika sudah mulai menjurus ke permintaan dana.

Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak staf Humas yang memanjakan “WTMM”. Hal tersebut berakibat kepada semakin merebaknya jumlah “WTMM” yang beroperasi di lapangan. “WTMM” serasa mendapat angin surga karena staf Humas terus memberikan apa yang memang mereka inginkan. Padahal tidak ada kewajiban dari staf Humas itu sendiri untuk turut mensejahterakan kehidupan wartawan apalagi “wartawan tanpa media massa” yang jelas-jelas kehadirannya dapat mencoreng nama baik profesi wartawan.

Adanya pemberian “amplop” dan uang THR bagi “WTMM” yang meliput di kantor Pemprov Jabar merupakan tanda tanya besar yang perlu segera ditindak lanjuti. Di satu sisi, organisasi kewartawanan seperti PWI berjuang keras untuk mampu memberantas keberadaan “WTMM”. Namun disisi lain, yaitu Humas instansi pemerintah malah seolah-olah memanjakan mereka dengan berbagai fasilitas yang akan membuat jumlah mereka semakin bertambah. Fenomena ini bukan kasus yang tergolong biasa tetapi sangat luar biasa. Sudah berlangsung cukup lama tetapi hingga saat ini tidak ada solusi yang mampu meminimalisirnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2002. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yin, Robert, K. Prof Dr (2008). *Studi Kasus Desain & Metode*, (terjemahan) oleh M. Djaudzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zen, Muhammad. 2010. *Jurus Ampuh Mengatasi Oknum Wartawan Nakal*. Jakarta: Cakrawala Media Publisher.